

	News Title : Dua Kali Diundur, Bursa Kripto RI Akhirnya Diluncurkan	
	Media Name : detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 22 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Fintech	Topic : Bursa Kripto

Dua Kali Diundur, Bursa Kripto RI Akhirnya Diluncurkan

Aulia Damayanti - detikFinance

Sabtu, 22 Jul 2023 08:30 WIB



Ilustrasi Foto: Shutterstock

Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan **bursa kripto** setelah dua kali diundur. Mulanya bursa berjangka kripto direncanakan meluncur pada 2021, kemudian mundur ke 2022, namun tak kunjung diluncurkan.

Hingga akhirnya pada Juli 2023 ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menetapkan bursa kripto, lembaga klining berjangka dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara untuk menjadi pengelola bursa berjangka komoditi kripto. Penetapan itu secara resmi diputuskan dalam Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK.07/2023 tertanggal 17 Juli 2023.

Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK.07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Klining Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Risk Aset Kripto kepada PT Klining Berjangka Indonesia.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK.07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tynet Depository Indonesia.

"Pembentukan bursa, klining, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya mendapatkan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan," tegas Didid, dalam keterangan tertulis, diulip. Jumat (21/7/2023).

Baca Juga:

RI Resmi Punya Bursa Kripto, Begini Respons Asosiasi cs

Didid menjelaskan, pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Persetujuan sebagai bursa, klining, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Risk Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Risk Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam pengembangan dan penguatan bursa, klining, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan serta masyarakat luas.

Ke depan, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

"Perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelas Didid.

(adafms)